

**PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TIMUR**

Oleh
Elis Tika Aprilianti
STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRACT

The objectives of regional autonomy are to further improve welfare and service to the community, develop democracy, justice and equity, and maintain harmonious relations between the central and regional governments. In order to carry out these services, funding is needed. PAD aims to provide flexibility to regions in optimizing their own funding potential in the implementation of regional autonomy as an embodiment and principle of decentralization. Development aims to achieve community prosperity through economic growth. Economic growth is the output generated from various sectors that provide an overview of how progress or setbacks have been achieved in the economic sector in a certain period. Regional Original Income has a positive effect on economic growth although the magnitude of the influence of Regional Original Income on economic growth in this study is relatively small. This shows that there are other factors that influence economic growth. Therefore, economic growth is important information that needs to get the government's attention in an effort to increase economic growth.

Keywords: local revenue, economic growth, regional autonomy, local government.

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Pemberlakuan kedua undang – undang tersebut maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya masing- masing. Dengan terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah berubah menjadi daerah otonom. Meskipun telah terjadi pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan dan kesejahteraan daerah yang secara agregat berpengaruh kepada perekonomian nasional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan pencerminan kemandirian dari suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan masyarakat daerahnya. Pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dari adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya asli yang telah dimiliki daerah tersebut. Setiap daerah pasti memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Daerah yang kaya akan sumber daya alam dan maju dibidang industri cenderung memiliki pendapatan daerah yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang tertinggal.

Dalam pemilihan data menggunakan rentang data yang lebih panjang dan data yang terbaru agar generalisasinya lebih baik. Selain itu, sebaiknya diupayakan untuk memperluas sampel dan daerah penelitian agar generalisasinya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Licolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harianto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Iskandar, N. (2008). *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mardisimo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nasution, A. (2009). *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*. Sofmedia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. (2005). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Samuelson, P. A. & W. D. Nordhaus. (2005). *Economic*. Eighteenth Edition. International Edition. McGraw – Hill Book Co., Singapura.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M.P. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- .